

## SIARAN PERS

Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara

No. 016/2022 tanggal 15 Agustus 2022

## PENEGAKAN TATA KELOLA YANG BAIK AKAN JAGA REPUTASI IKN

**SAMARINDA** – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, penegakan tata kelola yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas Ibu Kota Nusantara (IKN). Penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environment, social, and governance, ESG*) secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Semakin bagus kita menangani masalah-masalah lingkungan, masalah sosial, masalah-masalah yang berhubungan dengan tata kelola maka *cost of money*, biaya-biaya risiko, biaya-biaya reputasi akan semakin turun,” ungkap Bambang dalam seminar bertema “Tata Kelola dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan di Ibu Kota Nusantara” di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (15/8/2022).

Bambang menambahkan, semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan dengan bersih, patuh pada ketentuan menyangkut lingkungan, dan sangat menjaga *governance*-nya akan semakin terbuka pula peluang untuk mendapatkan investasi. “Tidak ada korupsi, tidak ada tender main-main, tidak ada ‘arisan’ maka akan semakin mudah dan murah untuk dapat mengakses pendanaan terutama di level internasional dan juga di lokal,” ungkap Bambang.

Pada tahap awal, pelaksanaan pembangunan IKN akan mendapatkan alokasi memadai dari APBN yang diharapkan menjadi pengungkit dan untuk menciptakan kepercayaan pasar. Pemerintah akan terus mengupayakan sumber pendanaan lain yang sah dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Metode *creative financing* yang baru seperti *municipal bond*, *SDG bond*, ataupun *green bond* menjadi alternatif yang mungkin akan diterapkan. Semua ini bisa dijalankan dengan efektif jika Ibu Kota Nusantara mempunyai ESG yang baik.

“Kami ingin membuktikan di 2024 nanti ada target-target yang bisa dilihat. Kira-kira 921 hektare yang akan kita lengkapi. Kami tidak hanya membangun gedung tapi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe hingga warung makan. Dengan demikian tentu investor akan melihat ini sebagai suatu yang akan dibangun berkelanjutan,” jelas Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Amiek Mulandari menyatakan dukungan atas tata kelola pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. “Misalnya dalam proses tender dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan ada yang menyimpang baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut berpotensi mengarah kepada tindak pidana korupsi,” ujar Amiek.

Sementara itu Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan menyampaikan bahwa pihaknya turut diajak melakukan pendampingan dalam proses pembangunan IKN. “KPK akan melakukan pendampingan di empat program yang meliputi analisis regulasi, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendanaan, dan pendampingan terkait proses pengalihan aset-aset yang ada di Jakarta untuk mendukung pendanaan IKN,” ungkapnya.

---

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyebutan untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang merupakan pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tertanggal 28 April 2022 dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

---

Keterangan lebih lanjut hubungi:

**Sidik Pramono**

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN

Telp. 0811 196 028